



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjiP) TAHUN 2022



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

SATPOL-PP



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN NATUNA**

JL. DATUK KAYA WAN MOHD. BENTENG Email : satpolppnatuna20@gmail.com Kode Pos 29783
RANAI

KATA PENGANTAR

ASSALAMU'ALAIKUM WR... WB

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat petunjuk dan karunia-nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022 berhasil kami susun. LKjiP ini disusun sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatan selama setahun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja.

LKjiP Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna Tahun 2022 ini kami susun sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau pun kegagalan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dalam upaya pencapaian Visi dan perwujudan Misi sebagaimana yang telah dituangkan dalam Rencana Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat tahun 2021 – 2026. Capaian kinerja sasaran, program maupun kegiatan yang telah ditetapkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban secara periodik.

LKjiP Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dari capaian kinerja untuk Tahun 2022. Rencana Kinerja 2022 merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai selama Tahun 2022 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021 – 2026. Sedangkan, capaian kinerja merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama Tahun 2022. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan identifikasi permasalahan dan strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian kinerja tersebut dimasa yang akan datang.

Akhirnya, kami menyadari bahwa masih banyak terdapat beberapa kekurangan dalam penyusunan LKjiP ini, untuk itu saran dan kritik untuk penyempurnaannya sangat diharapkan.

Kepada para pejabat struktural maupun staf di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna yang terlibat dalam penyusunan LKjiP Tahun 2020 ini kami ucapkan terima kasih.

Ranai, 27 Januari 2023

Kepala
Satuan Polisi Pamong Praja
dan Perlindungan Masyarakat



IRLIZAR, S.Sos

NIP. 19730816 200212 1 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna Tahun 2022 telah menyusun laporan kinerja sesuai dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja/pelaporan kinerja, tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah

Berdasarkan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natunatahun 2021 – 2026, kemudian dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahun 2022 dan Penetapan Kinerja Tahun 2022. Hasil Pengukuran Kinerja terhadap sasaran strategis yaitu Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna, di peroleh rata – rata capaian 100%.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan semua Bidang, Seksi, Subbagian, Staf dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna Tahun 2022 Anggaran sebesar Rp 16.078.811.839,00 dengan realisasi sebesar Rp. 15.764.328.617,00 atau 98.04 Persen.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I. PENDAHULUAN.	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Landasan Hukum	2
I.3. Maksud dan Tujuan	3
I.4. Gambaran Umum Organisasi	3
I.5. Sistematika Penyusunan	6
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.	8
II.1. Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021 - 2026	8
2.1.1. Visi dan Misi RPJMD 2021 - 2026.....	8
2.1.2. Tujuan dan Sasaran	9
2.1.3. Indikator Kinerja Utama	9
II.2. Perjanjian Kinerja	10
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	11
III.1. Pengukuran Kinerja	11
III.2. Analisis Kinerja	12
III.3. Realisasi Anggaran	24
BAB IV. PENUTUP.	25

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
TABEL. II. 1 Tujuan Dan Sasaran	9
TABEL. II. 2 Indikator Kinerja Utama	9
TABEL. II. 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	10
TABEL. III. 1 Skala Penilaian	11
TABEL. III. 2 Capaian Indikator Kinerja	13
TABEL. III. 3. Capaian Indikator Kinerja Kedua	21
TABEL. III. 4. Capaian Kinerja Anggaran Sesuai IKU Tahun 2022	22

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Pernyataan Perubahan Perjanjian Kinerja.....	26
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Later Belakang

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dan untuk memenuhi Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Inpres tersebut diwajibkan kepada setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang didasarkan pada suatu Perencanaan Strategis.

Laporan Kinerja merupakan salah satu perwujudan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dalam *Good Governance* dituntut adanya sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Natuna yang memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara, khususnya dalam bidang Peningkatan Ketentraman dan Ketrtiban Umur Serta Perlindungan Masyarakat. Pada tahun 2020, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna telah merencanakan dan melaksanakan sejumlah program, kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Perencanaan program, kegiatan, dan anggaran telah dilakukan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Natuna dan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja (LKj) adalah suatu laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan yang dibuat secara sistematis ini berisi tentang

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan adanya perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Terhadap Sasaran yang belum tercapai dikarenakan faktor internal tetap menjadi catatan bagi seluruh pejabat/pegawai/staf dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kinerja dimasa yang akan datang sehingga diharapkan kinerja yang dihasilkan dapat lebih memberi manfaat kepada masyarakat dan maupun pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna menyusun Laporan Kinerja Tahun 2022 ini.

I.2. Dasar Hukum.

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. TAPMPR No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

I.3. Maksud dan Tujuan.

Maksud dari Penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat ini adalah :

1. Perwujudan dari implementasi sistem pengendalian yang dituangkan dalam Tujuan dan Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat yang dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaian (program/kegiatan) yang selaras;
2. Siklus Sistem AKIP diawali dengan Penyusunan RPJMD Pemerintah Kabupaten Natuna dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat tahun 2021-2016, selanjutnya sistem Pengukuran Kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat yang berhasil;
3. Pada akhir periode pelaksanaan program dan kegiatan capaian kinerja yang berhasil dikomunikasikan kepada Bupati Natuna sebagai Pemberi amanah dan pihak-pihak yang berkepentingan;

Adapun tujuan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat antara lain :

1. Sebagai Sarana bagi Kepala OPD untuk menyampaikan pertanggungjawaban Kinerja kepada Bupati Natuna dan pihak yang berkepentingan;
2. Sarana Evaluasi atas pencapaian Kinerja OPD sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang;
3. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;

I.4. Gambaran Umum Organisasi.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Natuna menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor : 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Natuna berupa memberdayakan sumber daya yang ada, memfungsikan segala komponen yang

ada untuk mencapai target ditahun 2020. Tujuannya adalah agar semua fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Natuna menjadi lancar dalam pelaksanaannya.

1. Tugas Pokok

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor : 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, bahwa menyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung dan menyediakan keperluan fasilitas yang diperlukan oleh Kepala Bidang dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja serta menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli serta tenaga pendukung yang diperlukan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Kemampuan Daerah.

2. Fungsi

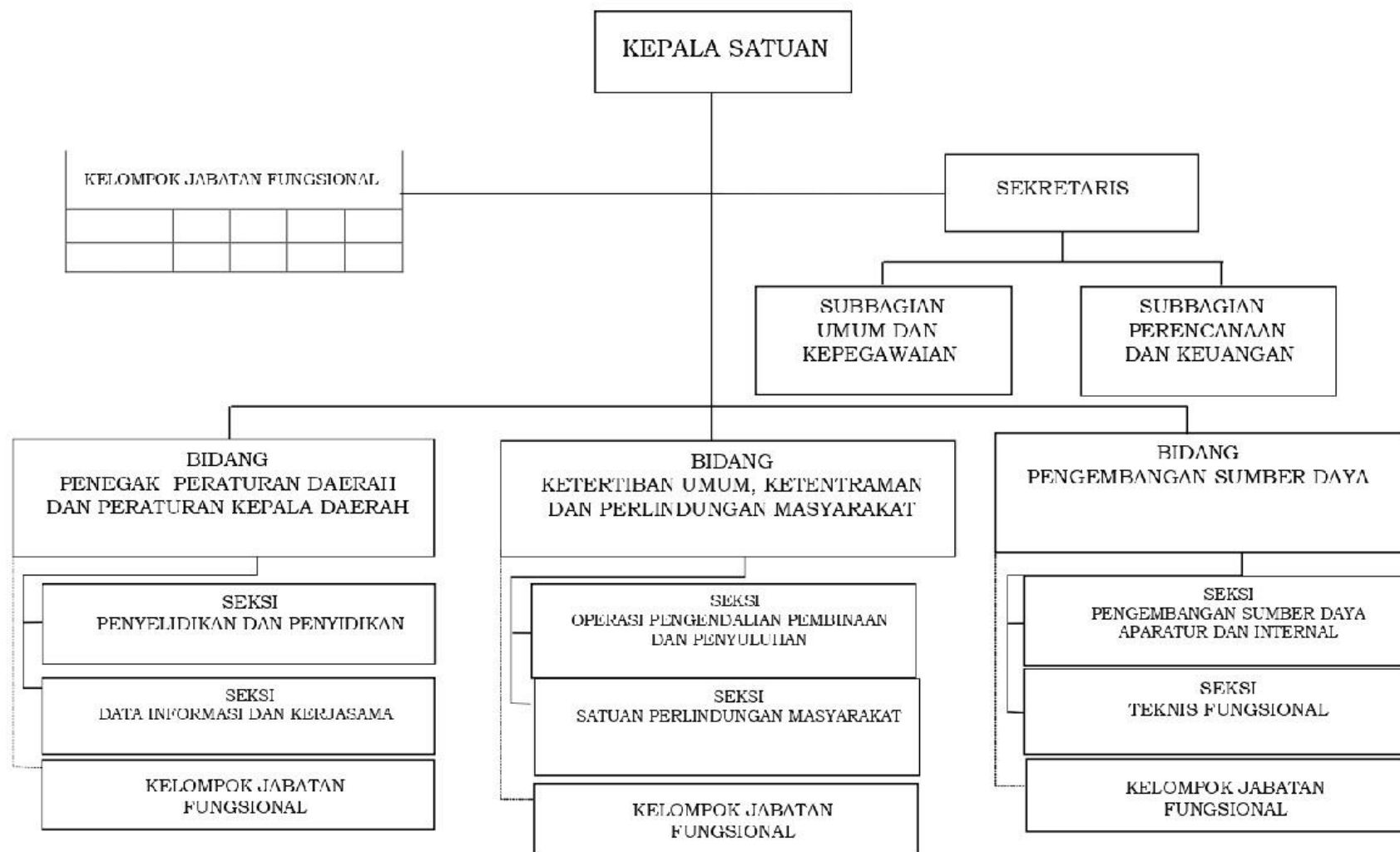
Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi;
2. Pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
3. Pelaksanaan Perlindungan Masyarakat;

3. Kewenangan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Natuna mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan program;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada;
3. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. Melaksanakan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, serta Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat dengan Aparat Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan agar mengetahui dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan Bupati sesuai lingkungan tugasnya;



I.5. Sistematika Penyusunan.

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif (Executive summary)

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

BAB I : PENDAHULUAN

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Dasar Hukum
- I.3. Maksud dan Tujuan
- I.4. Gambaran Umum Organisasi
- I.5. Sistematika Penyusunan

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

- II.1. Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021-2026
 - II.1.1. Visi dan Misi
 - II.1.2. Tujuan dan Saran
 - II.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- II.2. Perjanjian Kinerja

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- III.1. Pengukuran Kinerja
- III.2. Analisis Kinerja
- III.3. Realisasi Anggaran

BAB IV : PENUTUP

Bab ini juga diuraikan mengenai pencapaian sasaran dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja pemerintah Kabupaten Natuna. Bagian ini menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat tahun 2022 yang berkaitan dengan kinerja instansi serta saran yang diperlukan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran berisikan hasil Perjanjian dan pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna dalam pencapaian sasaran strategis.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1. Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021-2026

Rencana Strategis Pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan kerangka acuan (guard line) kebijakan, indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gambaran dan jawaban dari permasalahan sektor Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat itu sendiri. Rencana strategis ini merupakan alat bantu dalam mengukur efektivitas dari kinerja sumberdaya manusia pada instansi bersangkutan.

II.1.1. Visi dan Misi RPJMD Tahun 2016-2021.

Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 – 2026 adalah : “TERWUJUDNYA KABUPATEN NATUNA SEBAGAI KABUPATEN MARITIM YANG UNGGUL, EKSOTIS, AMAN DENGAN KEMANDIRIAN EKONOMI BERLANDASKAN NILAI RELIGIUS DAN KULTURAL”

Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Akselerasi Peningkatan Kualitas SDM
2. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Lokal
3. Menciptakan Kawasan Perbatasan yang Aman, Strategis dan Eksotis
4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur yang tertib dan teratur
5. Menciptakan Kualitas, Daya Tampung, dan Daya Dukung Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
6. Menciptakan Reformasi Birokrasi yang Cerdas (SMART BUREAUCRACY)
7. Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

II.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tabel. II.1
Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Indikator
1	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai Sakip	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Lakip	76.00
2	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	80
3	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat dalam Mematuhi Peraturan dan Perlindungan Kepada Masyarakat	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	Meningkatnya Ketentraman, Kertiban Umum dan Perlindungan Kepada Masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	91
				Persentase Kepatuhan Terhadap Perda/Perkada	91

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa ada 3 (tiga) tujuan, 3 (tiga) Sasaran dan 4 (empat) Indikator Kinerja. Namun yang akan diukur keberhasilan kinrjanya adalah indikator yang menjadi indikator kinerja utama (IKU) saja, Indikator Kinerja Utama (IKU) akan menjadi Perjanjian Kinerja pada tahun yang bersangkutan.

II.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Adapun indikator kinerja utama (IKU) dapat dilihat pada tabel II.2

Tabel II.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat dalam Mematuhi Peraturan dan Perlindungan Kepada Masyarakat	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	Meningkatnya Ketentraman, Kertiban Umum dan Perlindungan Kepada Masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
				Persentase Kepatuhan Terhadap Perda/Perkada

Dari Indikator Kinerja Utama (IKU) ini akan dibuat perjanjian kinerja yang akan ditetapkan oleh Bupati Natuna.

II.2. Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah. Untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara pemberi dan penerima amanah atas kinerja berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja secara berjenjang ini merupakan cara yang sistematis untuk mencapai target yang sudah disepakati. Masing-masing pejabat yang menerima amanah harus bertanggungjawab terhadap capaian target yang sudah dijanjikan dengan yang memberi amanah, jika tidak tercapai maka harus memberi alasan – alasan yang membuat target tersebut tidak dapat dicapai, sehingga sesuatu target yang belum dicapai tersebut dicari jalan keluarnya untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Adapun perjanjian kinerja pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel II.3. sebagai berikut :

Tabel II.3.
Perjanjian Kinerja tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Kepada Masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persen	91
		Persentase Kepatuhan Terhadap Perda/Perkada	Persen	91

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna adalah Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Kepada Masyarakat. Ada dua Indikator yang akan diukur dalam menganalisis tingkat keberhasilan sasaran yang akan dicapai.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna dalam melaksanakan program, kebijakan dan semua kegiatan dengan mengacu pada rencana strategi. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna, maka perlu diukur keberhasilannya yang disebut dengan pengukuran kinerja. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menerangkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna. Laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja tahun 2022 yang memuat realisasi kinerja yang diperpanjangkan tahun 2022.

III.1. Pengukuran Kinerja

Capaian Kinerja merupakan hasil dari pengukuran kinerja yang sudah dilaksanakan Kinerja yang diukur adalah kinerja yang sudah ditetapkan yang dimuat dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran Kinerja adalah proses untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja, didalam mengukur kinerja. Maka ada skala penilaian kinerja yang menjadi katagori capaian kinerja. Adapun skala penilaiannya adalah :

Tabel III.1
Skala Penilaian

No	Katagori	Nilai	Katagori Penilaian
1.	AA	>90 s/d 100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80 s/d 90	Memuaskan
3.	BB	>70 s/d 80	Sangat Baik
4.	B	>60 s/d 70	Baik
5.	CC	>50 s/d 60	Cukup
6.	C	>30 s/d 50	Kurang
7.	D	0 s/d 30	Sangat Kurang

Capaian Kinerja yang akan dihitung ada empat indikator kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2022.

Perhitungan Persentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja), perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

III.2. Analisis Kinerja

Sasaran yang sudah ditetapkan akan dianalisa sesuai dengan indikator yang akan diukur. Kemudian akan menganalisa program/kegiatan yang mendukung dalam pencapaian sasaran tersebut.

MISI Ke 3 RPJMD 2021-2026 :

Menciptakan Kawasan Perbatasan yang aman, Strategis dan Eksotis.

Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

1. Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Kepada Masyarakat
2. Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada

Adapun capaian kinerja pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel III.2.
Capaian Indikator Kinerja

NO	INDIKATOR	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase	91	91	100

Dalam mengukur capaian Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat menggambarkan hasil kinerja yang dilaksanakan selama tahun 2022 sebagai berikut :

Pelaksanaan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui :

a. Patroli

Dalam pelaksanaan Patroli Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat menerima laporan masyarakat dan temuan dilapangan secara langsung berikut data disajikan:

No	Pengaduan/Laporan	Lokasi	Hasil	Hambatan	Ket
1	Melaksanakan patroli wilayah tentang kebersihan dilokasi TPS	Pasar tradisional ranai	Sosialisasi kepada masyarakat tentang TPS	Nihil	8 Orang
2	Pelaksanaan patroli prokes di lapangan bola jarmin	Jln sudirman komplek jarmin	Banyak masyarakat tidak menggunakan masker	Nihil	12 Orang
3	Patroli Trantibum rutin	Komplek Masjid agung	Terdapat beberapa orang remaja yang melakukan balap liar	Kurangnya kesadaran remaja dalam berkendara	10 Orang
		Area gedung DPRD yang belum siap	Terdapat beberapa remaja yang sedang pacaran dan dibuat pernyataan	Nihil	10 Orang
		Komplek Masjid agung	Terdapat beberapa orang remaja yang melakukan balap liar	Kurangnya kesadaran remaja dalam berkendara	6 Orang
		Area pantai piwang	Terdapat beberapa orang remaja yang	Nihil	6 Orang

			sedang mabuk2kan dan diberi peringatan		
		Komplek Masjid agung Gedung dewan	Terdapat beberapa orang remaja yang melakukan balap liar dan remaja yang sedang pacaran (penyataan di tempat)	Nihil	10 Orang

Dokumentasi



b. Pengamanan

Dalam pelaksanaan pengamanan terbagi menjadi 2 yang terdiri dari pelaksanaan pengamanan aset daerah/pejabat daerah dan pengamanan kegiatan daerah/provinsi berikut data disajikan :

No	Kegiatan	Lokasi	Hasil	Hambatan	Ket
1.	Pengamanan Aset Daerah dan piket jaga rumah pejabat Rutin	Sesuai dengan pos yang telah ditentukan	Pengamanan dan piket jaga selalu aman terkendali	Tamu yang berkunjung jarang melapor ke petugas	25 Orang
2	Pengamanan Pengangkatan dan sumpah PNS	Gedung wanita	Pelaksanaan pengambilan sumpah berjalan dengan aman dan lancar	area parkir terlalu kecil	11 Orang
3	Pengaman pembukaan kegiatan Natuna Goespot	Pantai piwang	Kegiatan berjalan aman dan tertib	Nihil	15 Orang
4	Pengamanan vaksinasi Booster	Gedung Sri Serindit	Antusias masyarakat melaksanakan vasinasi	Nihil	10 Orang
5	Pengamanan acara isra' mi'raj	Komplek masjid agung	Kegiatan berjalan aman dan tertib	Nihil	15 Orang
6.	Pengamanan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	15 Kecamatan	Pelaksanaan Musrenbang kecamatan berjalan dengan baik	Mobilitas kendaraan kurang mendukung	6 Orang
7	Pengamanan penyuplaian minyak goreng	Wilayah bunguran timur	Terdapat masyarakat yang membuat keributan dan pembagian minyak goreng diberhentikan	Kurang tertibnya masyarakat dalam pembelian minyak goreng	30 Orang
8.	Pengamanan kegiatan acara Natuna Geo Sport dan Bazar Game Bhakti Kencana	Pantai Piwang	Kegiatan Berlangsung dengan keadaan aman terkendali	Nihil	15 Orang
9	Pengamanan kegiatan Peresmian Gedung Sentral Industri Kecil Menengah	Pasar rakyat	Kegiatan berlangsung dengan aman	Nihil	15 orang
10	Pengamanan pemberian suntik rutin terhadap ODGJ	Kelurahan Ranai Darat	Kegiatan berlangsung dengan aman	Nihil	7 Orang

11	Pelaksanaan pelepasan jamaah haji	Komplek masjid agung	Kegiatan berlangsung aman dan tertib	Nihil	15 Orang
----	-----------------------------------	----------------------	--------------------------------------	-------	----------

Dokumentasi



c. Pengawasan

Pengawasan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dalam kegiatan Pemerintahan daerah serta Tamu VIP berikut data disajikan :

No	Kegiatan	Lokasi	Hasil	Hambatan	Ket
1.	Pengawasan Pejabata Daerah dalam Melaksanakan	15 Kecamatan	Pengawasan dalam keadaan aman terkendali	Kurang memadai mabil pengawasan yang saat ini Satpol PP miliki	4 Orang/ kecamatan

	kunjungan pelaksanaan musrenbang kecamatan				
	Pengawalan sapari ramadhan	Pulau tiga	Aman terkendali	Mobil tidak dilengkapi dengan lampu rotator	4 Orang
2.	Pengawalan kegiatan peresmian Gedung Sentral IKM	Pasar Rakyat	Pengawalan dalam keadaan aman terkendali	Masih kurangnya masyarakat dengan dalam memahami serine pemberitahuan atau dibukakan jalan	5 Orang
	Pengawalan tamu luar	Masjid Ranai darat	Pengawalan aman dan terkendali	Nihil	8 Orang
	Pengawalan pelaksanaan pelepasan jamaah haji	Komplek masjid agung	Pengawalan aman terkendali	Nihil	4 Orang
	Pengawalan kunker walikota Batam	Gedung Sri serindit	Pengawalan aman dan tertib	Nihil	4 Orang

Dokumentasi



d. Pemberdayaan terhadap linmas

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan anggota satlinmas yang ada dikecamatan dan desa pada tahun 2022 tidak dilaksanakan disemua kecamatan yang ada melainkan pelaksanaan dilakukan secara monitoring dan pendataan serta pemantauan pelaksanaan kegiatan anggota satlinmas berikut data disajikan :

No	Bulan	Persiapan	Lokasi	Jumlah	Hasil	Ket
1.	Januari	Pelaksanaan rapat untuk melakukan pemetaan dalam pelaksanaan pemberdayaan pada bulan berikutnya	Ruang Rapat Satpol PP dan Linmas	12 Orang	Sesuai arahan pimpinan pelaksanaan pemberdayaan harus dilakukan dan disampaikan apa saja tupoksi lunmas	
2.	Februari	Melaporkan ke Pimpinan pelaksanaan pemberdayaan dan Menyiapkan SPT dalam melaksanakan pemberdayaan Linmas serta materi-materi untuk disampaikan	Kecamatan Midai / Suak Midai	35 Orang	Masukkan dari pihak kecamatan dan desa berharap Satpol PP melakukan pengadaan baju linmas dan Pelatihan anggota linmas	
		Melaporkan ke Pimpinan pelaksanaan pemberdayaan dan Menyiapkan SPT dalam melaksanakan pemberdayaan Linmas serta materi-materi untuk disampaikan	Kecamatan Serasan/ Serasan Timur	45	Masukan dari pihak kecamatan dan desa berharap Satpol PP melakukan pengadaan baju linmas dan Pelatihan anggota linmas serta Pembangunan Pos	
3.	Maret s.d Oktober	Melakukan konsultasi ke provinsi dan	Kecamatan bunguran timur,	4 Orang disetiap kecamatan	Banyak terdapat perubahan nama anggota	

		melakukan pendataan anggota linmas	timur laut, tengah, selatan dan batubi		linmas dan terdapat laporan linmas yang meninggal	
4.	November	Melaporkan kepada Pimpinan dan persiapan anggota Satpol PP untuk pemantauan pelaksanaan pemilihan kepala desa	9 Kecamatan dan 37 Desa	43 Orang	Pelaksanaan pemilihan Kades aman terkendali dan disetiap TPS ada petugas linmas	Kelengkapan pakaian dinas masha ada yang kurang
5.	Desember	Menyampaikan laporan selama pelaksanaan pemberdayaan linmas	Ruang Kasat	4 Orang	Arahan pimpinan untuk menyiapkan linmas dalam setiap pelaksanaan kabupaten, kecamatan, desa, acra lainnya	

e. Peningkatan SDM Satpol PP

Pelaksanaan kegiatan peningkatan SDM Satuan Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2022 dilakukan pengiriman peserta data disajikan :

No	Bulan	Persiapan	Lokasi	Jumlah	Hasil	Ket
1.	Februari	Peserta melakukan persiapan bahan untuk mengikuti Diklat Alih Jenjang	Pusdiklat Kemendagri (Bandung)	4 Orang	Dinyatakan Lulus	
2.	Maret	Peserta melakukan persiapan bahan untuk mengikuti Diklat	Pusdiklat Kemendagri (Bandung)	2 Orang	Dinyatakan Lulus	
3.	Juni	Peserta melakukan persiapan bahan untuk mengikuti Diklat Alih Jenjang	Pusdiklat Kemendagri (Bandung)	2 Orang	Dinyatakan Lulus	

Dokumentasi



Sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Natuna, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat melakukan kegiatan, Patroli, Pengawasan, Pengamanan, dan Pengawalan. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dalam melakukan kegiatan Patroli, Pengawasan, Pengamanan, dan Pengawalan didukung oleh 233 personil yang terdiri dari 76 personil ASN dan 110 personil PTT serta didukung personil PTT BKO kecamatan sebanyak 47 personil.

Upaya menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, saat ini kondisi patroli dilakukan sebanyak 3 kali dalam 1 hari. patrol rutin yang dilakukan dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat

Tabel III.3
Capaian Indikator Kinerja

NO	INDIKATOR	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	Persentase	91	91	100

Untuk mengukur capaian meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda/ dan Perkada Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat menggambarkan hasil kinerja yang dilaksanakan selama tahun 2022 sebagai berikut :

Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota melalui :

1. Penegakan Non Yustisi

Dalam pelaksanaan penegakkan non yustisi satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat sudah terlebih dahulu melakukan pengumpulan data, menerima laporan pengaduan maupun menerima hasil dari pelaksanaan tranribum data disajikan :

No	Kegiatan	Lokasi	Jumlah	Hasil	Hambatan	Ket
1	Pelaksanaan penegakan non yustisi Perda Nomor 15 Tahun 2019 pasal 31 ayat 1	Diluar kantin sekolah	15 Orang	Ditemukan 8 Orang yang bolos saat jam sekolah berlangsung	Nihil	Membuat surat pernyataan
2	Pelaksanaan penegakan non yustisi Perda Nomor 15 Tahun 2019 pasal 22 huruf e	Jln Datuk Kaya Wan Mohd. Banteng depan partamina	10 Orang	Ditemukan THM melebihi batas operasi serta dipanggil pemilik usaha	Nihil	Membuat surat pernyataan dan diberi surat peringatan
3	Pelaksanaan penegakan non yustisi Perda	Jln Datuk Kaya Wan Mohd.	10 Orang	Ditemukan THM melebihi	Nihil	Proses penyelesaian di bawa

	Nomor 15 Tahun 2019 pasal 22 huruf e	Banteng depan partamina		batas operasi serta dipanggil pemilik usaha		kekantor dan diberi peringatan keras serta Berita Acara Kesepakatan
--	--------------------------------------	-------------------------	--	---	--	---

2. Pelaksanaan Sosialisasi kepada masyarakat

Pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan oleh satpol pp dan linmas secara langsung saat penegakan perda yang dilakukan untuk lokasi yang dilakukan seperti : Pasar tradisional, TPS, Pantai Piwang dan Jl. Patimura Pring serta lokasi strategis lainnya.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Natuna, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat melakukan kegiatan, Pengawasan Perda/Perkada. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dalam melakukan kegiatan Pengawasan Perda/Perkada didukung oleh 233 personil yang terdiri dari 76 personil ASN dan 110 personil PTT serta didukung personil PTT BKO kecamatan sebanyak 47 personil.

Upaya dalam melaksanakan penegakan Perda/Perkada Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat selalu berkoordinasi yang terkait dalam operasi non yustisi maupun dalam pengawasan, pada tahun 2022 dalam melaksanakan penegakan perda/perkada terdapat beberapa pelanggaran dan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel III.4
Capaian Kinerja Anggaran Sesuai IKU Tahun 2022

No	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator	Capaian Kinerja Anggaran		
			Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP.	Rp 4.829.973.920,00	Rp.4.776.396.450,00	98,89
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran.	Rp 4.829.973.920,00	Rp 4.829.973.920,00	98,89

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan.	Rp 4.829.973.920,00	Rp 4.829.973.920,00	98,89
2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Wilayah Penegakan Perda serta Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 336.920.650,00	Rp. 336.920.650,00	93,17
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani			
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Rp. 169.776.900,00	Rp. 169.776.900,00	94,84
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 38.188.750,00	Rp. 38.188.750,00	93,16
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Rp. 56.455.000,00	Rp. 56.455.000,00	83,22
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Rp. 72.500.000,00	Rp. 72.500.000,00	97,00
3.	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Kepatuhan Terhadap Perda/Perkada	Rp. 54.774.900,00	Rp. 54.774.900,00	94,98

	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Rp. 54.774.900,00	Rp. 54.774.900,00	94,98
--	---	--	-------------------	-------------------	-------

III.3. Realisasi Anggaran

Selama Tahun 2022 pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada DPPA Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna dengan total nilai Rp 16.078.811.839,00, realisasi anggaran Rp 15.764.328.617,00 dan sisi anggaran tahun 2022 adalah Rp 314.483.222,00. Dengan serapan dana APBD mencapai 98.04 % dengan demikian dapat dikatakan tahun 2022 kondisi penyerapan anggaran Cukup Baik.

BAB IV PENUTUP

Laporan KinerjaIn stansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna Tahun 2022 disusun sebagai wujud akuntabilitas kinerja dalam pencapaian misi dan tujuan serta dalam rangka perwujudan “*good governance*”. Memperhatikan target dan sasaran tersebut dan mempertimbangkan dinamika dan perkembangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna, maka perlu direncanakan dan dirumuskan kegiatan-kegiatan yang inovatif dan efektif yang mengarah pada pencapaian target dan sasaran. Indikator Kinerja Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2022 tersebut merupakan parameter untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan komitmen instansi pemerintah (Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat) Kabupaten Natuna.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna kepada Bupati Natuna selaku Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dan pihak yang berkepentingan lainnya sebagai sumber informasi secara transparan.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, untuk menjadi bahan penilaian dan masukan dalam pelaksanaan tugas di masa mendatang.

Ranai, 27 Januari 2023

Kepala
Satuan Polisi Pamong Praja
Dan Perlindungan Masyarakat



IRIZAR, S.Sos
NIP. 19730916 200212 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **IRLIZAR, S. Sos**

Jabatan : **KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si**

Jabatan : **BUPATI NATUNA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Perubahan perjanjian kinerja tersebut meliputi perubahan anggaran dari Rp. 13.196.598.317,00 (Tiga belas milyar seratus sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh belas) menjadi Rp. 16.078.811.839,00 (Enam belas milyar tujuh puluh delapan juta delapan ratus sebelas ribu delapan ratus tiga puluh sembilan) sehingga mempengaruhi target kinerja awal. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ranai, 01 November 2022

Pihak Kedua,

WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si

Pihak Pertama,

IRLIZAR, S. Sos
NIP. 19730816 200212 1 004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Kepada Masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persen	91
2.	Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	Persentase Penanganan Pelanggaran Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	Persen	91

Jumlah Anggaran :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	15.687.116.289,00
2. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp.	391.695.550,00
Jumlah	Rp.	16.078.811.839,00


Bupati Natuna,

WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si

Ranai, 01 November 2022
 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
 Perlindungan Masyarakat



IRLIZAR, S. Sos
NIP. 19730816 200212 1 004

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

No	Sasaran Kinerja	Indikator Sasaran Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	91	91	100%
2	Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	Persentase Penanganan Pelanggaran Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	91	91	100%

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN NATUNA


IRLIZAR, S. Sos
NIP. 19730816 200212 1 004

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2021-2026

No	Sasaran Kinerja	Indikator Sasaran Kinerja	Realisasi					Target Akhir Renstra
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	91	0	0	0	0	95
2	Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	Persentase Penanganan Pelanggaran Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	91	0	0	0	0	95

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN NATUNA



IRLIZAR, S. Sos
NIP. 19730816 200212 1 004